

RINGKASAN

Di era digitalisasi ini, penggunaan teknologi digital membawa perubahan dan mempermudah aspek kehidupan sehari-hari. Implementasi digitalisasi dalam pelayanan administrasi adalah salah satu aspek yang memudahkan dalam melakukan proses pelayanan administrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga sudah menggunakan digitalisasi untuk mempermudah jalannya pelaksanaan tugas mengenai pertanahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, Tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah, pendaftaran tanah dilakukan oleh kementerian dan dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan sistem elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan digitalisasi dalam pelayanan administrasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui indikator isi kebijakan dan konteks kebijakan atau lingkungan implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk dapat menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian di waktu tertentu (Mukhtar, 2013: 10). Dengan sasaran penelitian yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan metode analisis interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi dalam pelayanan administrasi yang ada di Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga sudah baik dan digunakan secara maksimal. Dengan adanya implementasi digitalisasi ini juga meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas yang ada di Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Purbalingga. Namun, walaupun secara keseluruhan digitalisasi sudah digunakan dengan baik, kendala-kendala dalam menjalankan pekerjaan dengan digitalisasi ini juga masih muncul atau terjadi sehingga terkadang dengan adanya kendala tersebut menghambat pekerjaan yang sedang dijalankan.

Kesimpulan penelitian ini adalah implementasi digitalisasi yang ada di Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga sudah cukup bagus. Dimana digitalisasi dimanfaatkan dengan maksimal dalam penggunaannya. Namun, kendala-kendala pada sistem masih sering ditemui dalam implementasi digitalisasi tersebut. Sehingga masih perlu adanya perbaikan atau pengembangan terhadap sistem yang digunakan agar meminimalisir adanya eror pada sistem ketika sedang digunakan.

Kata Kunci : Implementasi Digitalisasi, Pengaruh Digitalisasi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), isi kebijakan, konteks kebijakan

SUMMARY

In this digitalization era, the use of digital technology brings changes and facilitates aspects of daily life. The implementation of digitalization in administrative services is one aspect that makes it easier to carry out the administrative service process. In carrying out its duties, Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga has used digitalization to facilitate the implementation of tasks regarding land. In accordance with the Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, concerning the issuance of electronic documents in land registration activities, land registration is carried out by the ministry and can use information and communication technology with electronic systems.

This research aims to analyze the implementation of digitalization policies in the administrative services of the Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Program through indicators of policy content and policy context or implementation environment. This research uses a qualitative approach with descriptive qualitative methods. Descriptive qualitative method is a method used to be able to find knowledge or theory on research in a particular time (Mukhtar, 2013: 10). With research targets determined through purposive sampling technique. Data collection was conducted through interviews, observation, and documentation analyzed using the interactive analysis method of Miles, Huberman and Saldana. This research shows that the implementation of digitalization in administrative services in the Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga is good and is use optimally. With the implementation of digitalization, it also increases effectiveness and efficiency in carrying out tasks in the Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. However, although overall digitalization has been used well, obstacles in carrying out work with digitalization also still arise or occur so that sometimes the existence of these obstacles hinders the work being carried out.

The conclusion of this research is that the implementation of digitalization in the Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga is quite good. Where digitalization is maximally utilized in its use. However, constraints on the system are still often encountered in the implementation of digitalization. So that there is still a need for improvement or development of the system used in order to minimize errors in the system when it is being used.

Keywords: Implementation of Digitalization, Effect of Digitalization, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), policy content, policy context